

## ALOKASI ANGGARAN PERUMAHAN UNTUK MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH

Pekerja menyelesaikan pembangunan perumahan bersubsidi di kawasan Nongsa, Batam, Kepulauan Riau, Minggu (29/8). Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengalokasikan anggaran perumahan bersubsidi untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) sebesar Rp28,2 triliun dari total anggaran perumahan sebesar Rp33,2 triliun pada 2022.



# Pemerintah Terus Mendorong Produk Ketenagalistrikan Bersertifikasi TKDN

Guna mewujudkan TKDN di sektor ketenagalistrikan, sangat dibutuhkan sinergi, dukungan, dan keterbukaan dari semua pemangku kepentingan. “Keterlibatan industri dalam negeri sebagai mitra kerja dalam proyek ketenagalistrikan diharapkan bisa berjalan optimal dan sesuai dengan kondisi dan kapabilitas industri terkini,” kata Agus Gumiwang Kartasasmita.

**JAKARTA (IM)** - Pemerintah terus mendorong optimalisasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di sektor ketenagalistrikan sebagai upaya substitusi produk impor. Berkembangnya industri mesin dan peralatan pendukung ketenagalistrikan di Indonesia sekarang ini diharapkan sejalan dengan meningkatnya penggunaan produk dalam negeri. Berbagai program sudah disiapkan oleh pemerintah untuk sektor ini, salah satunya

dengan menyediakan 9000 sertifikat TKDN gratis. Kementerian Perindustrian (Kemenperin) menaruh perhatian besar terhadap penguasaan industri energi khususnya untuk energi listrik. Pasalnya, hingga kini listrik merupakan salah satu sumber energi utama yang digunakan masyarakat maupun industri di dalam negeri. Mengingat begitu pentingnya sektor industri ini, Kemenperin terus berupaya mendo-

rong pelaku industri kelistrikan untuk meningkatkan penguasaan teknologi, sehingga TKDN setiap produknya juga ikut meningkat. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya substitusi produk impor, sekaligus meningkatkan kemandirian industri ketenagalistrikan di Tanah Air. “Seluruh masyarakat dan industri memerlukan listrik yang ketersediaannya terus berlanjut, terjangkau, dan cukup. Hal tersebut dapat memacu industri dalam negeri untuk menyediakan produk ketenagalistrikan yang berkualitas dan berdaya saing,” ujar Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita, Minggu (29/8). Upaya peningkatan penggunaan produk dalam negeri, termasuk pada infrastruktur ketenagalistrikan, sejalan dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2017 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Menurut Perpres tersebut, lanjut Agus, penggunaan produk lokal menjadi salah satu poin utama di dalam pembangunan pembangkit tenaga listrik 35.000 MW dan jaringan transmisi 46.000 km. Guna mewujudkan TKDN

di sektor ketenagalistrikan, sangat dibutuhkan sinergi, dukungan, dan keterbukaan dari semua pemangku kepentingan. “Keterlibatan industri dalam negeri sebagai mitra kerja dalam proyek ketenagalistrikan diharapkan bisa berjalan optimal dan sesuai dengan kondisi dan kapabilitas industri terkini,” ungkapnya. Menurut data Kemenperin, pada 2019, nilai impor industri peralatan listrik mencapai Rp116 triliun, dan mengalami penurunan pada 2020 menjadi Rp103 triliun. Penurunan impor tersebut menunjukkan industri pendukung ketenagalistrikan di Indonesia semakin tumbuh berkembang dan mampu memenuhi permintaan di pasar domestik. Saat ini terdapat 3.404 produk peralatan kelistrikan yang bersertifikasi, dengan nilai capaian TKDN di bawah 25 persen berjumlah 413 produk. Kemudian antara 25 persen hingga 40 persen mencapai 664 produk, dan melebihi 40 persen terdapat 2.327 produk. Untuk sektor industri kecil dan menengah (IKM), Kemenperin telah memberikan sertifikasi dalam periode

2018-2021 kepada 40 IKM yang mengikutsertakan 230 produk dengan nilai TKDN di atas 25 persen. Sebanyak 28 produk di antaranya merupakan peralatan kelistrikan. Kemenperin juga telah memberikan regulasi pengoptimalan TKDN untuk pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan melalui Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 54 Tahun 2012 tentang Pedoman Penggunaan Produk Dalam Negeri untuk Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan. Agus meyakini, kebijakan penggunaan produk dalam negeri dan pesatnya pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan akan membawa efek berganda yang luas, terutama mendorong kinerja sektor industri nasional. “Keberadaan listrik ibarat jantung bagi kehidupan sektor industri. Itu sebabnya, tidak berlebihan apabila investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia selalu menanyakan ketersediaan pasokan listrik,” ujarnya. • hen

## Hilirisasi Sektor Agro, Kemenperin Dukung Inovasi Produk Turunan Porang

**JAKARTA (IM)** - Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terus mendorong kebijakan hilirisasi industri berbasis agro, sehingga dapat memacu nilai tambah bahan baku dalam negeri. Langkah strategis ini juga membawa dampak positif terhadap peningkatan investasi, ekspor, dan penyerapan tenaga kerja sehingga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi nasional.

“Pendalaman struktur industri manufaktur di Indonesia juga diakselerasi melalui kebijakan hilirisasi berbasis sektor primer. Hal ini sejalan tekad Kemenperin dalam mewujudkan pembangunan industri nasional yang mandiri, berdaulat, maju, berkeadilan dan inklusif,” kata Plt. Direktur Jenderal Industri Agro Kemenperin, Putu Juli Ardika di Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (28/8).

Ia menyebutkan, hilirisasi berbasis agro yang mulai prospektif saat ini, yaitu industri pengolahan porang. “Kami memproyeksikan porang bisa menjadi salah satu komoditas pertanian unggulan baik di dalam maupun luar negeri. Peluang ini datang karena sebagian masyarakat telah beralih ke pola hidup sehat dengan mengonsumsi makanan yang lebih sehat,” ungkapnya.

Lebih lanjut, produk olahan porang mulai banyak diminati karena rendah kalori, karbon, dan kadar gula. “Saya meyakini produk olahan porang ini akan menjadi pilihan makanan sehat ke depannya. Bahkan, ini juga bisa menjadi pengganti beras yang lebih sehat karena kadar gulanya sangat rendah,” imbuhnya. Putu menuturkan, pihaknya telah melakukan diskusi langsung dengan pelaku industri pengolahan porang, yakni PT Asia Prima Konjac di Madiun dan PT Ambico beralamat di Pasuruan, Jawa Timur. Hal ini guna mendapat masukan terkait kebutuhan atau kendala yang dihadapi para pelaku industri tersebut sehingga dapat merumuskan kebijakan yang tepat ke depannya.

“Kemarin, kami melakukan kunjungan kerja di kedua pabrik itu untuk pendalaman, terutama terkait teknologi dan inovasi yang perlu dikembangkan. Sebab, ini akan menjadi keunggulan produk kita dalam bersaing di kancah internasional,” tandasnya. Direktur PT Asia Prima Konjac Revie Christianto menyampaikan, pihaknya memproduksi chip porang dan tepung porang dengan total kapasitas penggunaan bahan baku porang sebanyak 80 ton per hari. Jumlah tenaga kerja di PT Asia Prima Konjac sebanyak 150 orang. PT Asia Prima Konjac telah mengekspor produk chip porang sebanyak 2.500 ton ke RRT pada tahun 2020. Selain itu juga memiliki lahan porang seluas 3,5 hektare yang berada dalam kawasan perusahaan. “Kami sedang melakukan ekspansi untuk meningkatkan kapasitas produksi, dari 80 ton per hari akan menjadi 180 ton per hari pada tahun 2022 untuk memproduksi beras porang dan tepung porang. Jadi, nanti ada tambahan dua lini dengan masing-masing kapasitas 50 ton per hari,” ungkap Revie. Di lokasi terpisah, Direktur PT Ambico Johanes Soedjarmiko Ishii mengemukakan, peningkatan daya saing industri pengolahan porang harus sejalan dengan peningkatan kualitas bahan bakunya. “Oleh karena itu, diperlukan riset dan inovasi. Kami percaya Indonesia bisa menjadi pemain utama di kancah global,” ujarnya. PT Ambico merupakan salah satu industri pengolahan hilir tepung glukomanan menjadi konyaku, beras shirataki dan mi shirataki. Perusahaan sudah memproduksi tepung porang dan tepung glukomanan dengan kemampuan glukomanan mencapai 91%. Selain mengekspor tepung glukomanan, PT Ambico juga telah mengapalkan chip porang, shirataki dan konyaku. Negara tujuan eksportnya antara lain ke Amerika Serikat, Kanada, Perancis, RRT, Jepang, dan Korea Selatan. • dot

**WHITE HORSE GROUP**  
PT. WEHA TRANSPORTASI INDONESIA Tbk  
RINGKASAN RISALAH  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN (RUPST) DAN  
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA (RUPS LB)

Direksi PT. Weha Transportasi Indonesia Tbk (“Perseroan”) dengan ini memberitahukan bahwa RUPST dan RUPS LB (“Rapat”) Perseroan, telah diselenggarakan pada:

Waktu : Pukul 10.00 WIB s.d 12.00 WIB  
Hari & Tanggal : Kamis, 20 Agustus 2021  
Tempat : Ruang Pertemuan “Tully Care” L16, Gedung Pancoran di Tomang Raya No.02, Jakarta Barat.

Adapun Ringkasan Risalah Rapat ini diumumkan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 49 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.02/2012 tanggal 20 April 2012 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

1. Mata Acara Rapat adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan dan Pengesahan atas Laporan Tahunan termasuk Laporan Tahunan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
2. Penetapan penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020.
3. Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan mengaudit buku Perseroan tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2021.
4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk penentuan pphonorarium dan/atau tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

II. RUPS LB

1. Pelaksanaan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham (“PMEHMETD”) sesuai dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Perubahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Perubahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan HMETD, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan struktur pemodalannya.
2. Persetujuan untuk memberikan wewenang dan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan dalam rangka melakukan penerbitan HMETD.
3. Persetujuan Penyesuaian Maksud dan Tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI 2020) serta penambahan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
4. Persetujuan untuk mengubah dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan OJK Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
5. Persetujuan untuk meninjau kembali seluruh data ke Lembaga Keuangan, Bank, dan/atau Lembaga Non Keuangan serta manajemen kekayaan Perseroan dan/atau pemberian Corporate Guarantee Perseroan pada Lembaga Keuangan, Bank, dan/atau Lembaga Non Keuangan lainnya.

2. Rapat dihadiri oleh Dewan Komisaris Perseroan, yaitu:

DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
Komisaris Utama	Salipando Tiratissala	Direktur Utama	Agrestis Chandra
Komisaris Independen	Daniel Martinus	Direktur	Edgar Sutardi
		Direktur	Tiodora Amran Bonardy
		Direktur	Andrianto Putera Tiratwisata
		Direktur	Romy Firmangsturi

3. - Bahwa dalam RUPST diadiri oleh 738.944.586 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 83,364 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa dalam RUPS LB diadiri oleh 738.944.586 saham yang memiliki hak suara sah atau setara dengan 83,364 % dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.
- Bahwa ternyata ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak setuju dan abstain dalam RUPST dan ada pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak setuju dalam RUPS LB.
6. Jumlah Pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak setuju dan abstain dalam RUPST dan Jumlah Pemegang saham yang mengeluarkan suara tidak setuju RUPS LB yaitu:

Mata Acara	Jumlah Pemegang Saham/Kuasanya yang bertamta	hasil pemungutan suara		
		setuju	tidak setuju	abstain
<b>RUPST</b>				
1	tidak ada	738.944.586 saham	100 saham (0,00001353% dari yang hadir)	-
2	tidak ada	738.944.586 saham	100 saham (0,00001353% dari yang hadir)	-
3	tidak ada	738.944.586 saham	100 saham (0,00001353% dari yang hadir)	10.000 saham (0,0135328 % dari yang hadir)
4	tidak ada	738.944.586 saham	100 saham (0,0119681% dari yang hadir)	-
<b>RUPS LB</b>				
1	tidak ada	738.944.586 saham	100 saham (0,00001353% dari yang hadir)	-
2	tidak ada	738.944.586 saham	100 saham (0,00001353% dari yang hadir)	-
3	tidak ada	738.944.586 saham	100 saham (0,00001353% dari yang hadir)	-
4	tidak ada	738.944.586 saham	100 saham (0,00001353% dari yang hadir)	-
5	tidak ada	738.944.586 saham	100 saham (0,00001353% dari yang hadir)	-

10. Hasil Keputusan Rapat Para pemegang saham adalah sebagai berikut:

1. RUPST:

- 1) Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Tahunan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris, Laporan Tugas Direksi, dan pengesahan Laporan Keuangan konsolidasian Perseroan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dan karena memberikan pembebasan dan pelunasan (accout et discharge) sepenuhnya kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam anggaran yang telah diumumkan dalam tahun tersebut.
- 2) Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dengan tidak akan membagikan dividen kepada para pemegang saham, karena Perseroan tidak memiliki laba bersih perseroan untuk tahun buku 2020 sebesar Rp 33.601.480.667,- (tiga puluh tiga miliar enam ratus satu juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus enam puluh tujuh rupiah).
- 3) Menyetujui Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai Kantor Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan periode-periode lainnya dalam tahun buku 2021 apabila dianggap perlu, sekaligus memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan Kantor Akuntan Publik serta jumlah honorarium Kantor Akuntan Publik tersebut termasuk untuk mengganti Kantor Akuntan Publik jika dipandang perlu berdasarkan pertimbangan yang dianggap perlu.

II. RUPS LB:

1. Menyetujui pelaksanaan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham (“PMEHMETD”) sesuai dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Perubahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Perubahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan HMETD, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan struktur pemodalannya.
2. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melakukan tindakan-tindakan sehubungan dengan PUT I dengan cara memberikan HMETD kepada Para Pemegang Saham Perseroan tersebut, menetapkan rasio HMETD dan waran, menetapkan harga pelaksanaan HMETD dan waran, menetapkan jumlah PMEHMETD dan waran, menetapkan penggunaan dana yang didapat dari HMETD dan waran, dan melakukan tindakan yang dianggap perlu.
3. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu guna melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:
4. Menetapkan penyesuaian gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Perseroan serta dilampirkan wewenangnya kepada Komisaris Utama untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan bagi masing-masing anggota Perseroan dengan memperhatikan masalah dan pertimbangan dari Komite Remunerasi dan Remunerasi bagi masing-masing Dewan Komisaris tersebut.
5. Menetapkan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.

2) Menyetujui pelaksanaan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham (“PMEHMETD”) sesuai dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Perubahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Perubahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan HMETD, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan struktur pemodalannya.
- 3) Menyetujui pelaksanaan penambahan modal Perseroan dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu kepada para pemegang saham (“PMEHMETD”) sesuai dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Perubahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Perubahan Modal Perusahaan Terbuka dengan memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, termasuk persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan HMETD, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan struktur pemodalannya.
- 4) Menetapkan penyesuaian gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Perseroan serta dilampirkan wewenangnya kepada Komisaris Utama untuk menentukan besarnya gaji dan/atau tunjangan bagi masing-masing anggota Perseroan dengan memperhatikan masalah dan pertimbangan dari Komite Remunerasi dan Remunerasi bagi masing-masing Dewan Komisaris tersebut.
- 5) Menetapkan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menentukan besarnya gaji dan tunjangan lainnya bagi seluruh anggota Direksi Perseroan untuk tahun buku 2021.

3) a. Menyetujui untuk mengubah dan menyatakan kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka penyesuaian terhadap ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang 20 April 2020 Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.

b. Memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu guna melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:

5) Menyetujui untuk meninjau kembali seluruh data ke lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan serta manajemen kekayaan Perseroan dan/atau pemberian Corporate Guarantee Perseroan pada lembaga keuangan, bank, dan/atau lembaga non-keuangan lainnya.

Jakarta, 30 Agustus 2021  
Direksi Perseroan

INTERNATIONAL MEDIA, SENIN 30 AGUSTUS 2021

## BPR SUPRA

---

## PULAUINTAN

General Contractor

---

PT. INDOCHEMICAL CITRA KIMIA  
Solvents, Industrial and Specialty Chemicals

**SU 01019**  
TELEPON KE LUAR NEGERI LANGSUNG DARI PONSEL

*Wajon Hemat Ke Luar Negeri*  
suara Jernih ngobrol pun nyaman

**Cuma Rp 6 an./detik**

**Tekan Kode Akses 01019 dan XL**

01019 Kode negara Kode area No Telepon yang dituju OK/Yes

Contoh (Malaysia - Kuala Lumpur): 01019 60 3xxxxxxx

https://www.facebook.com/GaharuTelecom https://www.twitter.com/GaharuTelecom

\* Khusus untuk negara China, USA, Canada, Hong Kong, Singapore: tarif Rp 6an./detik dengan menggunakan GSM Telkomsel  
\* Tarif belum termasuk PPN & pembantuan per 6 detik

INFO LEBIH LANJUT SILAHKAN HUBUNGI  
Customer Service : 021-634 5009  
Mobile : 0811 17 50 291-95  
SMS : 0811 47 50 369

## Kementerian BUMN Sebut Restrukturisasi Berhasil Tingkatkan Kinerja PTPN

**JAKARTA (IM)** - Holding Perkebunan Nusantara (PTPN) meraih untung pada Juni 2021 lalu dan berhasil melakukan restrukturisasi utang. Kementerian BUMN menyebut, ini menjadi contoh program restrukturisasi berhasil.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, langkah transformasi yang dilakukan Holding Perkebunan Nusantara, menjadi salah satu bukti keberhasilan Kementerian BUMN dalam melakukan restrukturisasi. “Ini menjadi contoh keberhasilan Kementerian BUMN dalam melakukan restrukturisasi, transformasi, dan meningkatkan kinerja Holding Perkebunan Nusantara,” kata Arya, dalam keterangannya, Minggu (29/8). Diungkapkan Arya, kondisi Holding Perkebunan Nusantara sebelum ini dalam kondisi sulit. Beban utang menumpuk akibat kinerja kerja yang buruk. Tercatat, utang Holding Perkebunan Nusantara mencapai Rp41 triliun.

## Indonesia Perkuat Digitalisasi Jasa Keuangan

**JAKARTA (IM)** - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Komunikasi dan Informatika sepakat memperkuat digitalisasi di sektor jasa keuangan guna memperluas layanan dan tetap melindungi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Ketua Dewan Komisiner OJK Wimboh Santoso menyebut, pandemi Covid-19 menjadi momentum bagi seluruh pelaku ekonomi termasuk di sektor jasa keuangan untuk mengakselerasi transformasi digitalnya dengan memanfaatkan potensi Indonesia yang sangat besar. “Pelaksanaan transformasi digital harus dimulai dengan membangun satu ekosistem keuangan digital yang lengkap dan terintegrasi, yang terdiri dari infrastruktur digital, literasi digital, pemahaman konsumen, pengembangan UMKM digital, dan dukungan pemerintah melalui kebijakan yang akomodatif,” ujar Wimboh dalam acara “Arah dan Diskusi Perkembangan Teknologi di Indonesia dan Visi Digitalisasi Nasional Kepada Pelaku Sektor Jasa Keuangan” di Jakarta, seperti dikutip dari Antara. OJK menyatakan sangat

“Tahun lalu, Holding PTPN masih mencatatkan kerugian sebesar Rp1,1 triliun. Namun, kinerja Holding kini sudah moncer. Bahkan, bisa menghasilkan keuntungan sebesar Rp1,4 triliun,” ujar Arya. Arya juga memuji langkah Holding PTPN menerapkan teknologi digital, bahkan sudah berhasil menembus tingkat maturitas level 4. Kondisi ini mampu mengubah citra PTPN dari perusahaan yang megap-megap dan sulit berkembang menjadi perusahaan yang maju. “Bayangkan, selama ini kan citra PTPN adalah perusahaan tradisional. Kini, PTPN masuk ke level teknologi digital dengan maturitas level 4. Hanya ada tiga BUMN lho, yang masuk level itu. Salah satunya PTPN ini,” ucap Arya. Laba bersih perseroan naik 227,8% senilai Rp1,45 triliun atau naik 2 kali lipat lebih dari tahun lalu yang sebelumnya rugi sebesar Rp1,1 triliun (yoy). Perseroan bahkan 2 tahun berturut-turut mengalami kerugian. • dro

mendukung pengembangan digitalisasi di sektor jasa keuangan, selain sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan industri jasa keuangan, juga untuk tujuan meningkatkan inklusi keuangan masyarakat yang berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat. “Untuk mengembangkan ekonomi digital di Indonesia harus ditopang dengan prasyarat fundamental yaitu memastikan transformasi digital untuk mencapai access, affordability, dan ability dengan fokus utama membangun infrastruktur digital yang memadai dan merata, tidak hanya kepada masyarakat perkotaan, namun juga masyarakat pedesaan, sehingga layanan digital dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat dengan mudah, murah dan cepat,” kata Wimboh. Wimboh menambahkan, ekonomi Indonesia harus dikembangkan ke arah digital karena ke depannya ekonomi berbasis digital akan menjadi motor penggerak utama pertumbuhan ekonomi. Ekonomi digital diharapkan dapat mendorong UMKM masuk ke rantai pasok global sehingga pemulihan ekonomi pasca Covid-19 dapat terakselerasi dengan baik. • pan